

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rinto. 2003. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashofa, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidiqqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- H.A.W Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Sudi Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prawiranegara Sjarifuddin. 1998. *Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Said, Mas'ud M. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Penerbitan UMM.
- Sirajudin dkk. 2009. *Parlemen Lokal DPRD*. Malang: Setara.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukardi.2003. *Metodologi Penelitian PendidikanKompetisi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offise.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jurnal

Asmawi. 2014. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-UndanganPemerintahan Daerah dan Lembaga LegislatifDaerah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN: Jurnal Cita Hukum Vol.1No.1.

A.A Oka Mahendra.2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 1.

Bambang Iriana Djajaatmadja. 2006. *Peranan DPRD Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangandi Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 1.

Marlina Theresia. 2018. *Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang Tahun 2015-2017*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Diponegoro Law Jurnal Vol.7 No.1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib DPRD.

Website

<http://economicpeople.blogspot.co.id/2016/05/otonomi-daerah.html>
diakses pada 26/10/17 22:25.

<http://dprd.semarangkota.go.id/page/sejarah> diakses pada 12/12/17 08:25

https://www.kompasiana.com/kevinry00/pelaksanaan-otonomi-daerah-di-indonesia_58384b065eafbd2909e87f73 diakses pada 07/10/17 22:38

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
diakses pada 17/10/17 22:45

<https://kbbi.web.id/otonomi> diakses pada 22/10/17 15:30.